

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH (SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Sinta Puspitaningrum^{*}), Mahirun

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pekalongan

Email : sintapus160@gmail.com ; mahirun@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to test and analyze whether SIMDA Implementation, Quality of Human Resources, and Top Management Support affect the Quality of Financial Reports at the Ulujami District Office. The population in this study is Ulujami District Office Employees. With a sample of 30 respondents. The type of data used in this study is primary data, namely by using a direct questionnaire instrument, which was analyzed using multiple linear regression using the SPSS program. The results of the study concluded that The implementation of SIMDA has a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports, where the t value is 1.281 and the sig value. $0.037 < 0.05$, The quality of Human Resources has a significant positive effect on the Quality of Financial Statements, where the t value is 2.682 and the sig value. $0.013 < 0.05$, and. Top Management Support has an insignificant negative effect on the Quality of Financial Statements where t count is -1.227 and the value of sig. of $0.231 > 0.05$.

Keywords: SIMDA implementation, quality of human resources, top management support and quality of financial reports

PENDAHULUAN

Tata kelola administrasi pelaporan keuangan daerah di setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan. Kalau sebelumnya sistem pelaporan keuangan masih secara manual atau tradisional, saat ini sudah menggunakan suatu aplikasi yang merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi secara keseluruhan yaitu mengenai data pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Perkembangan aplikasi SIMDA diterapkan bersamaan dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), guna menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara komprehensif dan terintegrasi, dan berguna untuk mewujudkan praktik pengelolaan

keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Sampai dengan 30 Juni 2020, program aplikasi SIMDA telah diimplementasikan di 444 pemda dari 542 pemda atau 81,91% (www.BPKP.go.id). Salah satu produk dari SIMDA adalah SIMDA Keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengolah informasi berupa data keuangan di

daerah. SIMDA Keuangan memberikan gambaran mengenai perencanaan anggaran, penatausahaan pengeluaran dan penerimaan kas maupun pelaporan dalam bentuk akuntansi. Untuk Implementasi SIMDA Keuangan telah diperuntukkan sebanyak 449 Pemda di Indonesia.

Tabel 1. Fenomena SIMDA Tahun 2017-2019

No	Tahun	Kualitas Laporan Keuangan	Implementasi SIMDA	Kualitas SDM dan Manajemen
1	2017	76%	371 pemda	65,04
2	2018	82%	394 pemda	65,67
3	2019	82%	440 pemda	66,32

Sumber : www.bpk.go.id, <https://pemalangkab.bps.go.id>

Fenomena kualitas laporan keuangan digambarkan dari Opini WTP BPK, dan pada semester I tahun 2019, BPK telah memeriksa 542 (100%) LKPD Tahun 2018 dari jumlah tersebut BPK memberikan opini WTP pada 443 LKPD (82%) berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan RPJMN 2015-2019. Sedangkan implementasi SIMDA digambarkan melalui semakin meningkatnya program aplikasi SIMDA telah diimplementasikan di 444 pemda dari 542 pemda atau 81,91% yang menunjukkan SIMDA sangat menunjang kebutuhan pemerintahan di Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam rangka mengemban amanat PP nomor 56 tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA keuangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang telah berhasil menerapkan SIMDA keuangan secara menyeluruh mulai tahun 2003. Penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dalam mengolah data keuangan daerah di OPD Kecamatan Ulujami tentunya menimbulkan dampak tersendiri bagi pengguna. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan aplikasi SIMDA Keuangan di kantor Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari variabel-variabel implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, dan dukungan

manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan

KAJIAN TEORITIS

a. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2002), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan hal penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan PP tersebut pengelolaan harus berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Wahab dan Solichin (2008) dalam pengertian yang luas implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan negara setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor (Grizzle dan Pettijohn, 2002). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Subarsono (2005) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu komunikasi (Communications), Sumber daya (resource), Sikap (diposition) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

c. Sistem, Informasi, dan Manajemen

Sistem menurut Sutabri (2012) pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Atmosudirdjo (2012) mendefinisikan bahwa sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur

atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Yakub (2012) menerjemahkan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sementara Sutabri (2012) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang.

Manajemen adalah rangkaian aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuannya (Bangun, 2008). Sedangkan Stoner (2006) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

d. Sistem Informasi Manajemen

McLeod (2010) menerjemahkan sistem informasi manajemen sebagai sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Jogiyanto (2006) menerangkan sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi

untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Dengan demikian sistem informasi manajemen berperan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan.

e. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan,

pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- 2) Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA.
- 3) Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
- 4) Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government.
5. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

f. Implementasi SIMDA

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, pemerintah daerah memerlukan adanya implementasi sebuah sistem aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Usman (2002) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Teknologi informasi akan menjadi pendukung bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Pada saat sistem informasi akuntansi (SIA) terintegrasi dengan teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan output informasi yang dapat melemahkan kinerja organisasi.

Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan (Alfian, 2014). Penerapan SIMDA pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut, diharapkan informasi akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi tersebut. Kualitas laporan keuangan tergantung bagaimana implementasi dari SIMDA (Ole, 2015) karena implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah kualitas sumber daya manusia (Alfiani dan Arifin, 2017; dan Setyawan dan Fauzan, 2018) dan dukungan manajemen puncak (Ardana, 2009; dan Wahyuni dan Wahyono, 2018).

Implementasi SIMDA merupakan penerapan system dalam perencanaan, panatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas informasi yang dihasilkan dalam implementasi SIMDA bertujuan untuk menilai input, output dan penyimpanan data serta menunjukkan apakah pengguna akhir memperoleh informasi yang akurat, relevan, lengkap dan tepat waktu (Sugiyantari, 2017).

g. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2012) kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Robbins dan Judge (2008) menyatakan kemampuan adalah kapasitas seorang individu dalam melakukan berbagai tugas sebuah pekerjaan. Dalam hal ini menurutnya kemampuan pemakai sistem informasi dapat dilihat melalui tiga hal, yakni:

- 1) Pengetahuan (knowledge)
Pengetahuan sebagai pemakai sistem informasi dapat dilihat melalui:
 - a. Memiliki pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi.
 - b. Memahami pengetahuan tugas dari pekerjaannya sebagai pemakai sistem informasi.
- 2) Kemampuan (abilities)
Kemampuan sebagai pemakai

sistem informasi dapat dilihat dari:

- a. Kemampuan menjalankan sistem informasi yang ada.
 - b. Kemampuan untuk mengekspresikan kebutuhan informasi.
 - c. Kemampuan untuk mengekspresikan bagaimana sistem seharusnya.
 - d. Kemampuan mengerjakan tugas dari pekerjaan.
 - e. Kemampuan menyelaraskan pekerjaan dengan tugas.
- 3) Keahlian (skills) Keahlian sebagai pemakai sistem informasi dapat dilihat dari:
- a. Keahlian dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.
 - b. Keahlian dalam mengekspresikan kebutuhan-kebutuhannya dalam pekerjaan.

Kemampuan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pemakai. Kinerja dari pemakai yang memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan komputer akan lebih baik dibandingkan dengan kinerja pemakai yang tidak memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan komputer, semakin tinggi tingkat pengetahuan pemakai akan meningkatkan penggunaan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja pemakai sistem informasi.

h. Dukungan Manajemen Puncak

Setiap organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan mengukurnya sampai sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai, dan itu memerlukan dukungan manajemen puncak. Manajemen puncak adalah manajer yang bertanggung jawab untuk manajemen keseluruhan dari

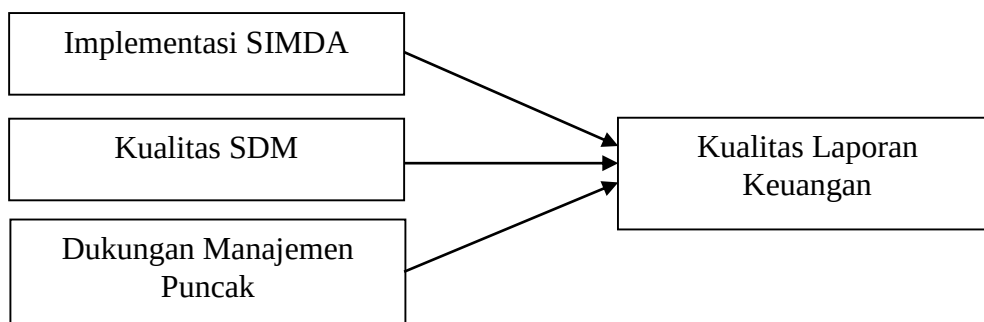
organisasi dan menetapkan kebijakan operasi serta mengarahkan interaksi organisasi dengan lingkungannya (Rahmalia, 2010). Menurut Ardana (2009) dukungan manajemen puncak merupakan tanggungjawab seorang manajer atau atasan untuk mampu menyemangati setiap karyawan guna mampu mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang optimal. Dukungan manajemen puncak adalah kegiatan yang berdampak, mengarahkan dan menjaga perilaku manusia yang ditunjukkan oleh direktur, presiden, kepala divisi dan sebagainya dalam organisasi (Dewi dan Dwirandra, 2013). Langkah yang paling menentukan keberhasilan perencanaan sistem adalah langkah pertama, yaitu mendapatkan dukungan penuh dari manajemen puncak/atasan (Wilkinson, 2009).

Hasibuan (2006) menyatakan bahwa terdapat 3 indikator bentuk dukungan manajemen puncak yang terdiri dari: (1) Memberikan pujian, penghargaan, piagam dan lainnya kepada karyawan yang berprestasi /

memiliki kinerja baik merupakan dukungan manajemen terhadap karyawannya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan menciptakan kebanggaan kepada setiap individu karyawan, (2) Memberikan fasilitas – fasilitas yang menunjang kelancaran tugas merupakan suatu dukungan manajemen yang bertujuan untuk menciptakan suasana nyaman bagi karyawannya dan membuat setiap individu karyawan tersebut memiliki semangat dalam melakukan pekerjaannya, (3) Memberikan pengawasan dan pengarahan kepada setiap karyawan adalah suatu bentuk dukungan manajemen terhadap karyawannya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan.

i. Model Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi SIMDA, kualitas sumberdaya manusia, dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan yang digambarkan dalam model penelitian.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah Kantor Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Populasi yang digunakan adalah pegawai pegawai Kecamatan Ulujami. Operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Implementasi SIDA

Implementasi SIMDA merupakan penerapan system dalam perencanaan, panatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitasinformasi yang dihasilkan dalam implementasi SIMDA bertujuan untuk menilai input, output dan penyimpanan data serta menunjukkan apakah pengguna akhi rmemperoleh informasi yang akurat, relevan, lengkap dan tepatwaktu (Sugiyantari, 2017). Indikator Implementasi SIDA terdiri dari akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kualitas Intelektual (pengetahuan dan ketrampilan), dan Pendidikan menjadi indikator variabel kualitas sumber daya manusia (Rahardjo, 2010).

3. Dukungan Manajemen Puncak

Dukungan Manajemen Puncak adalah kegiatan yang berdampak,

mengarahkan dan menjaga perilaku manusia yang ditunjukkan oleh direktur, presiden, kepaladivisi dan sebagainya dalam organisasi (Dewi, 2013). Indikator dukungan manajemen puncak (Ikhsan dan Bustamam, 2016) adalah pimpinan/manajer, harapan tinggi, keterlibatan, perhatian, rating pemakaian

4. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala a bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut (Baldric, 2015), dengan indikator relevan, andal, dapat di bandingkan, dan dapat di pahami.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala *likert's* untuk mengukur tanggapan responden atau respon. pengujian pengaruh Implementasi SIMDA, kualitas sumber daya manusia dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS setelah melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen pertanyaan dan uji asumsi klasik yang disyaratkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan responden pegawai kecamatan ulujami yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari :

- 1) Laki-laki sebanyak 22 orang (73,3%) dan jenis kelamin

perempuan sebanyak 8 orang (26,7%)

- 2) Usia 21-30 tahun sebanyak 15 orang (50%), berusia usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (40%), dan berusia usia 40-50 tahun sebanyak 3 orang (10%). Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 21-30 tahun sebanyak 15 orang (50%).
- 3) Pendidikan SMA sebanyak 4 orang (13,3%), memiliki pendidikan Diploma sebanyak 7 orang (23,3%), memiliki pendidikan S1 sebanyak 14 orang (46,7%), dan memiliki pendidikan S2 sebanyak 5 orang (16,7%). Hal tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu berpendidikan S1.
- 4) Jabatan responden Struktural sebanyak 9 orang (30%), Jabatan Fungsional 0 (0%) dan Jabatan Pelaksana sebanyak 21 orang (70%)
- 5) Masa kerja <1 tahun sebanyak 4 orang (13,3%), selanjutnya masa kerja 1 tahun sebanyak 6 orang (20%), masa kerja 2 tahun sebanyak 3 orang (10%), masa kerja 3 tahun sebanyak 10 orang (33,3%), masa kerja 4 tahun sebanyak 5 orang (16,7%) dan Masa kerja 5 tahun sebanyak 2 orang (6,7%). Hal ini berarti Pegawai kantor Kecamatan Ulujami didominasi dengan masa kerja 3 tahun sebanyak 10 orang.

b. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Hasil pengujian validitas seluruh variabel penelitian per item pertanyaan menunjukkan hasil yang valid sehingga seluruh item

pertanyaan pada variabel penelitian memiliki kelayakan untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Sementara hasil pengujian reliabilitas pada seluruh variabel penelitian diperoleh nilai Alpha adalah lebih besar dari 0,60 sehingga semua variabel dinyatakan reliabel. Dengan demikian jawaban responden terhadap indikator pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan menguji beberapa asumsi klasik diantaranya Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinearitas.

- 1) Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2 tailed) adalah 0,519 dan di atas nilai signifikan (0.05), maka dapat dikatakan berdistribusi normal.
- 2) Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser, diperoleh semua nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai alphanya (0,05), maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.
- 3) Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error dengan error periode sebelumnya dengan menggunakan Durbin Watson.
- 4) Hasil uji multikolinearitas terhadap seluruh variabel bebas (independen) menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VIF < 10, sehingga dapat dikatakan bahwa

semua konsep pengukur variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

d. Hasil uji kelayakan model

Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu implementasi simda, kualitas SDM, dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pegawai kecamatan ulujami .

Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Model

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64,997	3	21,666	11,784	,000 ^b
	Residual	47,803	26	1,839		
	Total	112,800	29			

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai F hitung = 11,784 dengan signifikansi 0,000. Dengan nilai signifikansi 0,05 dapat disimpulkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak untuk diujikan.

e. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut (tabel 2) :

1) Pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,281 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.037, karena tingkat signifikan kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi simda memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh positif dan signifikan diterima.

Implementasi SIMDA berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil analisis variabel implementasi SIMDA diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 1,281 dengan tingkat signifikan sebesar 0,037 berada lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat implementasi SIMDA maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi SIMDA sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tersebut akan lebih handal dan tepat waktu dalam penyampaian.

2) Pengaruh kualita sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian memperoleh nilai t-hitung sebesar 2.685 dengan tingkat signifikansi 0.013, karena tingkat signifikan kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan diterima.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis variabel kualitas sumber daya manusia diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 2,682 dengan tingkat signifikan sebesar 0,013 berada lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan

(Mardiasmo, 2009). Logis dari temuan ini adalah ketika seseorang memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya maka ia akan menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dan lebih cepat.

3) Dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil pengujian memperoleh nilai t-hitung sebesar -1.227 dengan tingkat signifikansi 0.231, karena tingkat signifikan lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif dan signifikan ditolak.

Dukungan manajemen puncak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis variabel dukungan manajemen puncak diketahui memiliki nilai t hitung sebesar -1,227 dengan tingkat signifikan sebesar 0,231 berada lebih besar dari $\alpha=0,05$. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan manajemen puncak maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Logis dalam penelitian ini adalah atasan memberikan pengarahan yang baik pada

karyawannya dalam bekerja, memaksimalkan komunikasi dua arah sehingga menyebabkan tidak terjadinya kesalahan komunikasi antara atasan dan bawahan. dan atasan mengoptimalkan dalam

membangun motivasi dan rasa percaya diri bawahan sehingga menyebabkan kesiapan bawahan dalam bekerja tinggi. Namun motivasi tidak selalu mempengaruhi hasil.

Tabel 3. Hasil pengujian regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	4,523	2,534	,856	,000
	implementasi SIMDA	,273	,213	,358	1,281
	Kualitas SDM	,658	,245	,609	2,682
	Dukungan Manajemen Puncak	-,208	,169	-,255	-1,227

Sumber : Output SPSS

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi SIMDA berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Ulujami, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi simda mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Ulujami.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap, kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Ulujami, hal tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Ulujami.
3. Dukungan Manajemen Puncak berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Ulujami, hal tersebut menunjukkan bahwa Dukungan Manajemen Puncak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Ulujami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- A.F. Stoner. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

- Alfiani, Nur dan Atwal Arifin,. 2017. Pengaruh Impelementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Tegal). Tesis. Universitas Muhammdiyah Surakarta.
- Ardana, Komang, 2009. Perilaku Keorganisasian. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Atmosudirdjo. 2012. Sistem Informasi Manajemen. Penerbit STIA-Lembaga Administrasi Niaga Press, Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008. Kode Etik Dan. Standar Audit. Edisi Kelima. Penerbit Pusdiklat, Bogor.
- Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua).Edisi Pertama.Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Bangun, Wilson. (2008). Intisari Manajemen. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung
- Basyiruddin Usman. 2002. Media Pendidikan. Penerbit Ciputat Press, Jakarta.
- Dewi, Sang Ayu Nyoman Trisna dan AANB Dwirandra, 2013. Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual, dan Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di Kota Denpasar. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal: 196-214.
- Grizzle, Gloria A. and Carole D. Pettijohn, 2002, "Implementing Performance-Based Program Budgeting: A System-Dynamic Perspective", Public Administration Review, Jan/Feb 2002;62,1
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Ikhsan, M., dan Bustaman, 2016. Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak dan Kemampuan Teknik Operator Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1 No. 1, hal. 36-46.
- Jogiyanto, Hartono, 2006. Analisis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktural Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mohammad Alfian, 2014. Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD. 3rd Economics & Business

- Research Festival 13 November 2014. Hal 1698-1712.
- Ole, H. R. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). *Accountability*, 3(2); hal. 1-15.
- Rahmalia, Sri Rika. 2010. Pengaruh Keterlibatan Pengguna, Ukuran Organisasi dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan jasa di Banda Aceh. Skripsi tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Raymond McLeod, Jr., 2010. *Management Information System*. Prentice Hall
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Penerbit, Salemba Empat, Jakarta.
- Setyawan, Setia Andi dan Fauzan, 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Desa yang Memiliki BUMDes Se Kabupaten Tegal). *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Sugiyantari, D., Titisari, P., & Sumani, S. (2018). Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Cloud Pada Pemerintah Kabupaten Jember. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1); hal.106-118.
- Wahyuni, Tri dan Wahyono, 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar). *tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yakub, 2012, *Pengantar Sistem Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja (Edisi Ke 3)*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Wilkinson. 2009. *Sistem Informasi dan Informasi*. Edisi ke 2 alih bahasa Marianus Sinaga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 58 Tahun 2005. Tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah